



P E M E R I N T A H
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAPPEDA
KALTIM

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tahun 2019 - 2023



Samarinda
2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Hidayahnya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 telah disusun dengan baik.

Dokumen Renstra disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (3) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan serta menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan. Sehingga Renstra merupakan perencanaan yang akan menjadi dasar kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim yang harus dilaksanakan semaksimal mungkin.

Dokumen Renstra akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Prov. Kaltim. Dengan demikian, atas kerja dari seluruh Tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan pemikiran disampaikan terimakasih.

Samarinda, 30 April 2019

**KEPALA BAPPEDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**


Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si
NIP. 19590714 198611 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	
Daftar Isi	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar.....	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-4

BAB II. GAMBAR PELAYANAN BAPPEDA PROV.KALTIM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA Prov.Kaltim	II-1
2.1.1. Tugas Pokok BAPPEDA Prov.Kaltim	II-1
2.1.2. Fungsi BAPPEDA Prov.Kaltim	II-1
2.1.3. Struktur Organisasi BAPPEDA Prov.Kaltim.....	II-2
2.1.4. Uraian Tugas	II-3
2.2. Sumber Daya BAPPEDA Prov.Kaltim	II-8
2.2.1. Sumber Daya Manusia BAPPEDA Prov.Kaltim.....	II-8
2.2.2. Aset dan Modal.....	II-10
2.2.3. Unit Usaha yang Masih Operasional.....	II-14
2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA Prov.Kaltim	II-15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA Prov. Kaltim	II-45

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA PROV.KALTIM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA Prov. Kaltim.....	III-1
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	



Daerah Terpilih.....	III-4
3.3. Penelaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Prov. Kaltim.....	III-13
3.4. Penelaahan RT-RW Provinsi Kalimantan Timur.....	III-14
3.4.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.....	III-14
3.4.2. Penelaahan Terhadap Rencana Pola Ruang.....	III-17
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda Prov. Kaltim	III-18

BAB IV. TUJUAN DAN SARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Prov.Kaltim.....	IV-1
4.2. Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Prov. Kaltim.....	IV-2

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan BAPPEDA Prov.Kaltim	V-1
--	-----

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program.....	VI-1
6.2. Rencana Kegiatan.....	VI-6
6.3. Indikator Pencapaian Tujuan.....	VI-8
6.4. Pendanaan Indikatif.....	VI-9

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Pegawai BAPPEDA Prov.Kaltim Berdasarkan Eselon Dan Jenis Kelamin Tahun 2018	II-8
Tabel 2.2. Aset dan Modal	II-10
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Prov. Kaltim	II-17
Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi dan Capaian Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	II-45
Table 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-3
Table 3.2. Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	III-5
Table 3.3. Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	III-5
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim	IV-4
Table 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V-2
Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Strategi	VI-2
Tabel 6.2. Program, Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Indikatif (dalam juta)	VI-11
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi	II-3
Gambar 2.2. Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim.....	II-9
Gambar 2.3. Grafik Golongan ASN pada Bappeda Prov. Kaltim	II-9
Gambar 2.4. Grafik Tingkat Pendidikan ASN Bappeda Prov. Kaltim.....	II-10
Gambar 2.5. Grafik Tingkat Pendidikan Tenaga Non PNS Bappeda Prov. Kaltim	II-10

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, ruang dan fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan sebagai penentu tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi penting terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selain melaksanakan tugas juga harus melaksanakan fungsinya sebagai; Perumus Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pelaksana Evaluasi dan Pelaporan, Pelaksana Administrasi Kedinasan, dan pelaksana fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Kaltim sebagai Perangkat Daerah selain menjalankan fungsi juga melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dengan demikian selaku Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Prov. Kaltim berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan perencanaan Bappeda Prov. Kaltim selama 5 (lima) tahun dan mengacu pada perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel serta berkualitas.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaga Negara Tahun 1956 nomor 65, Tambahan Lembaga- Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5679)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2019-2023.
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
 11. Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;



14. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/5678/B.P3D-Bapp/2018
Perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur, tanggal 26 November 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 merupakan pedoman pelaksanaan bagi seluruh Aparatur Sipil Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun. Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 digunakan pula sebagai dasar Rencana Kerja tahunan (Renja) dan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

Tujuan utama penyusunan Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan sebagai koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun secara sistematis sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan,** menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
- BAB II Gambaran Pelayanan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur,** menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

- BAB III** **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur,** mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, serta isu-isu strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- BAB IV** **Tujuan dan Sasaran,** berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- BAB V** **Strategi dan Arah Kebijakan,** berisi strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI** **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,** mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII** **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** mengemukakan indikator kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
- Bab VIII** **Penutup,** Berisi ringkasan serta langkah langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta tata kerja Bappeda Prov. Kaltim adalah sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok Bappeda Prov. Kaltim

- 1) Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.
- 2) Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Fungsi Bappeda Prov. Kaltim

- 1) Penyusunan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan
- 2) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan
- 3) Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- 5) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 6) Pelaksanaan fungsi lainnya diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya



2.1.3. Struktur Organisasi Bappeda Prov. Kaltim (sesuai dengan Susunan Organisasi

Tata Kerja)

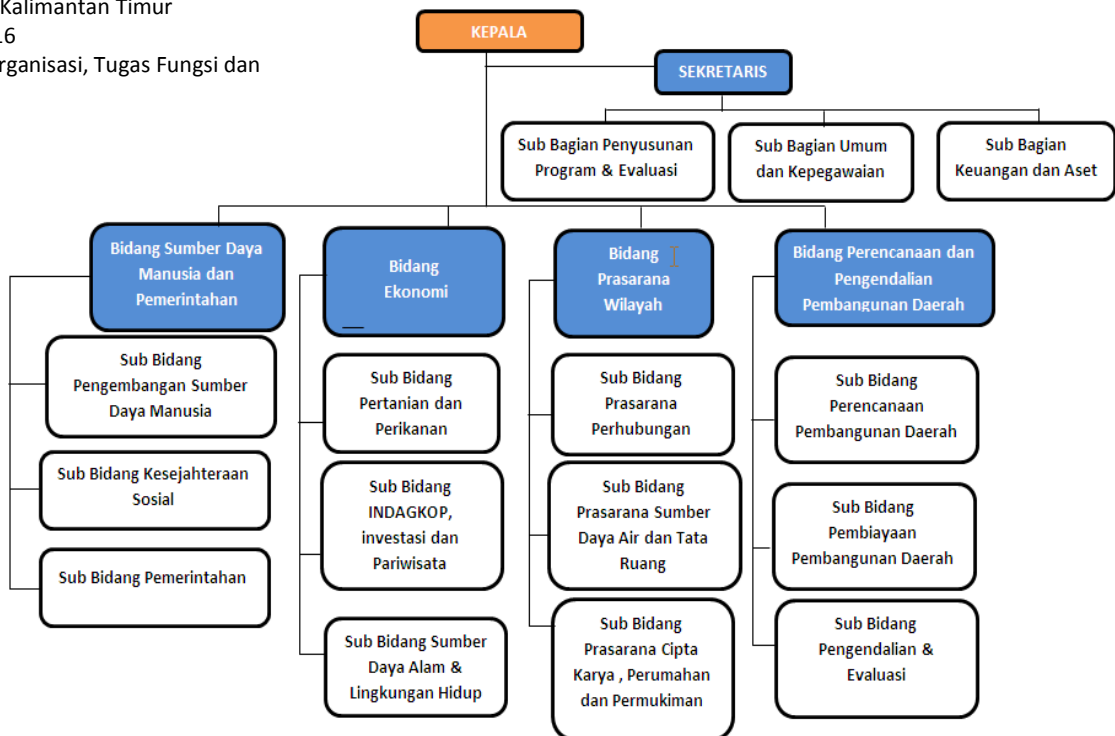
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat Badan yang terdiri dari :
 1. Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Ekonomi terdiri dari:
 1. Subbidang Pertanian dan Perikanan
 2. Subbidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata
 3. Subbidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
- d. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan terdiri dari:
 1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
 2. Subbidang Kesejahteraan Sosial
 3. Subbidang Pemerintahan
- e. Bidang Prasarana Wilayah terdiri dari:
 1. Subbidang Prasarana Perhubungan
 2. Subbidang Prasarana Sumberdaya Air dan Tata Ruang
 3. Subbidang Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman
- f. Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah
 3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi

Gambar 2.1

Struktur Organisasi

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 76 Tahun 2016
Tentang : Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan
Tata Kerja Bappeda



2.1.4. Uraian Tugas

Uraian Tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut;

A. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan, Mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Untuk melaksanakan Tugas pokok Kepala Badan menyelenggarakan fungsi dan kewenangan yaitu :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;

- b. Perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ekonomi;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia dan pemerintahan;
- f. Perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang prasarana wilayah

B. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset. Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan membawahi 3 (tiga) subbagian yang masing masing dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan, serta pengaduan masyarakat;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Bidang Ekonomi

- 1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang Ekonomi. Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kepala Bidang Ekonomi membawahi 3 (tiga) Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ekonomi.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Ekonomi menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan Bidang Ekonomi
 - b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pembangunan di bidang Ekonomi;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang pertanian dan perikanan
 - d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata
 - e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

D. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan

- 1) Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang sumberdaya manusia dan pemerintahan. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan dan membawahi 3 (tiga) subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan

- 2) Untuk melaksanakan tugasnya bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang sumber daya manusia dan pemerintahan
 - b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang sumberdaya manusia dan pemerintahan
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang pengembangan sumber daya manusia
 - d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang kesejahteraan sosial
 - e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang pemerintahan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya

E. Bidang Prasarana Wilayah

- 1) Bidang Prasarana wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan perencanaan teknis di bidang prasarana wilayah. Bidang Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Prasarana Wilayah membawahi subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Prasarana Wilayah.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Prasarana Wilayah menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang prasarana wilayah
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang prasarana wilayah
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang Prasarana Perhubungan
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya

F. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

- 1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan perencanaan teknis di bidang pembangunan daerah. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah membawahi 3 (tiga) subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- 2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
 - b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah



- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang perencanaan pembangunan daerah
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang pembiayaan pembangunan daerah
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang pengendalian dan evaluasi
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya

2.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1. Sumber Daya Manusia Bappeda Prov. Kaltim

Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memiliki personil sebanyak 182 orang secara keseluruhan yang terdiri dari 108 jumlah orang PNS dan 74 Jumlah tenaga *outsourcing*.

Tabel 2.1

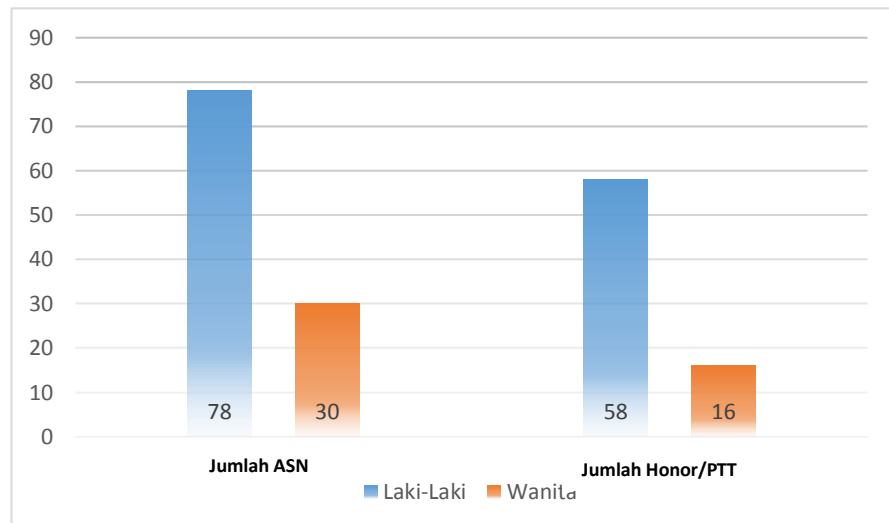
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan
Esselon dan Jenis Kelamin tahun 2019

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Doktor	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Kepala Badan	1		1				1						
Sekretaris	1		1					1					
Ka. Bidang	3	1	4					2	2				
Ka.Subbag	3			3				1	2				
Ka.Subbid	7	5	6	3				5	7				
Kasi	2		2						2				
Staf	61	24		50	34	4		13	27	3	39	1	2
Jumlah PNS	78	30	14	56	34	4	1	22	40	3	39	1	2
Jumlah Honor/PTT	58	16						3	34	2	30	4	1
Jumlah PNS + Honor/PTT	136	46	28	112	68	8	1	25	74	5	69	5	3

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan peraturan daerah adalah : 1 (satu) orang Esselon II; 5 (lima) orang Esselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang kepala bidang, Serta 17 orang esselon IV dan 84 orang non esselon.

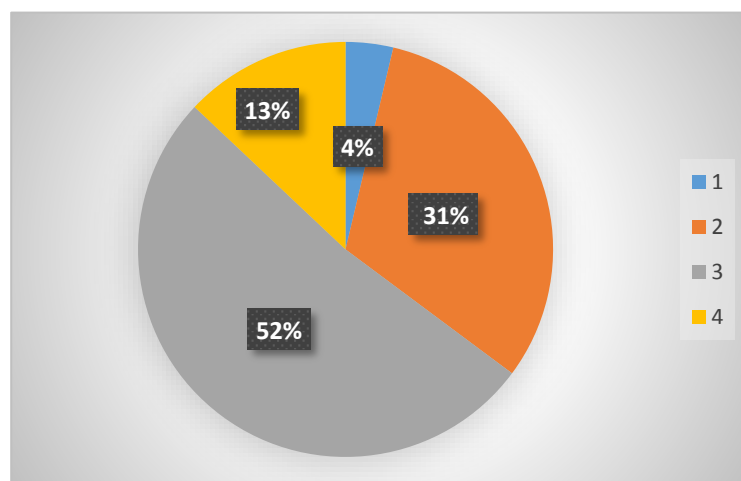


Gambar 2.2. Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim



Pegawai Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga Honorer/PTT. Berdasar pada jenis kelamin ASN Pria berjumlah 78 orang dan ASN Wanita berjumlah 30 orang. ASN tersebar rata pada bidang bidang perencanaan dan Sekretariat. Selain ASN terdapat pula Tenaga Honor/PTT yang berfungsi membantu ASN dalam melaksanakan tugas tanpa lepas tangan dari ASN.

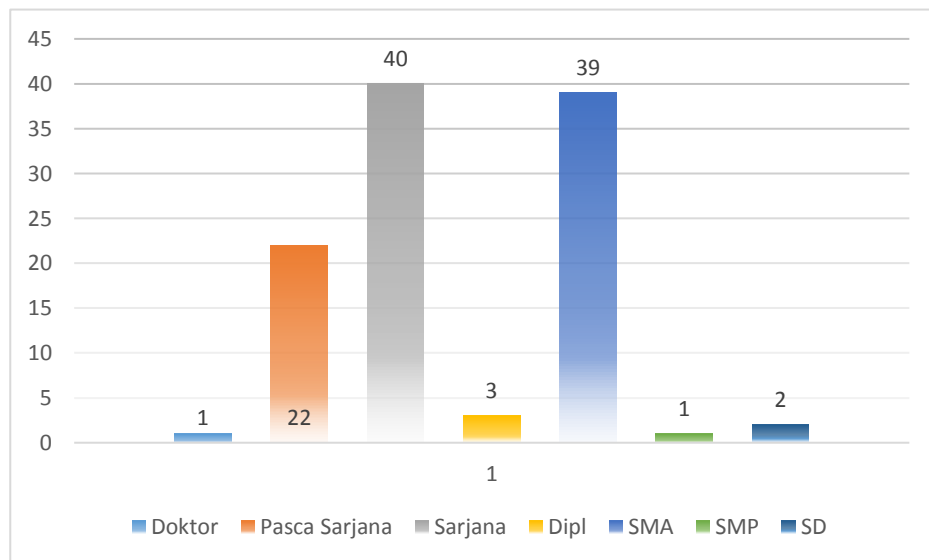
Gambar 2.3. Grafik Golongan ASN pada Bappeda Prov. Kaltim



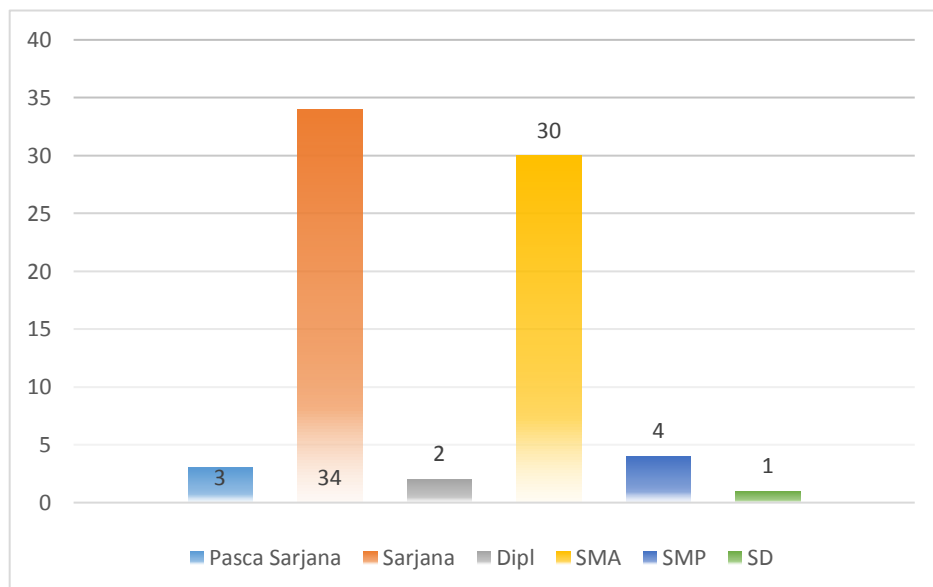
ASN yang bekerja di Perangkat Daerah Bappeda Prov. Kaltim seperti pada gambar 2.2 dilakukan penggolongan dan pengelompokan dilakukan sesuai dengan

jabatan yang diemban dapat pula berbanding lurus dengan masa kerja yang telah ditempuh selama menjadi ASN. Pada Bappeda Prov. Kaltim Golongan IV berjumlah 14 orang yang terdiri dari Esselon II, III dan IV dan Non Eselon 1 orang.

Gambar 2.4. Grafik Tingkat Pendidikan ASN Bappeda Prov. Kaltim



Gambar 2.5. Grafik Tingkat Pendidikan Tenaga Non PNS Bappeda Prov. Kaltim





2.2.3. Aset dan modal

Tabel 2.2
Aset dan Modal

No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
1	Komputer	13
2	AC	55
3	Printer	40
4	Kursi Kayu / Busa	13
5	Kursi Kerja	20
6	Mesin Fotocopy	4
7	Lemari Arsip	28
8	Mesin Penghancur Kertas	5
9	Meja Resepsionis	14
10	Kursi Tamu	12
11	Meja Tamu	9
12	Meja Kecil Samping	10
13	TV	10
14	Telephone Pabx	9
15	Meja Kerja	33
16	Sekat Partisi Staf	24
17	Sekat Partisi Esselon IV	2
18	Jam Dinding	7
19	Lemari	25
20	Meja Bundar	3
21	Kursi Putar	30
22	Kulkas Mini	1
23	Server CCTV	2
24	Brankas	5
25	Meja Rapat	133
26	Dispenser	7
27	Mesin Ketik	4
28	Kursi Rapat	518
29	Lampu Dinding	6
30	Meja Satpam	1
31	Mini PC	1
32	Lemari Es	3
33	Kursi Menghadap	4
34	Meja Arsip	2



No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
35	White Board	5
36	Laptop	1
37	Telephon	1
38	Filling Kabinet 2 Laci	10
39	Filling Kabinet	3
40	PC Server	1
41	UPS	3
42	Filling Kabinet 3 Laci	1
43	Mesin Penghitung Uang Portable	2
44	Note Book	1
45	Filling Kabinet 3 Laci	4
46	Filling Kabinet 4 Laci	2
47	Meja	1
48	Kursi Besi	219
49	Kipas Angin	6
50	Kursi Rapat Kayu	9
51	Foto Gubernur	1
52	Foto Wakil Gubernur	1
53	Rak Buku	3
54	Peta Wilayah	11
55	Jam Mekanis	1
56	Lambang Garuda Pancasila	1
57	Meja Samping/Tambahan	1
58	Tempat Sampah	1
59	Meja Rak	2
60	Speaker	11
61	Microphone Kabel & Wireless	84
62	Monitor CCTV	2
63	Meja Panjang Khusus TV	1
64	Sofa	4
65	Rak Buku	1



No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
66	Kursi Hadap	2
67	Meja Keamanan	1
68	Kursi	1
69	Meja Pimpinan Rapat	2
70	Meja Podium	1
71	Meja Tambahan	4
72	Meja Tambahan Rapat	2
73	Foto Presiden	1
74	Foto Wakil Presiden	1
75	Meja Proyektor	2
76	Loa Speaker	8
77	Kursi Pimpinan	22
78	Screen Proyektor	10
79	Pengharum Ruangan	3
80	Papan Backdrop Spanduk	1
81	Tiang Bendera	2
82	Power Amplifier	1
83	Mixing Console	1
84	Power Amplifier	1
85	DVD Player Portable	1
86	Meja Saji	4
87	Meja Lipat	4
88	Meja Tambahan	5
89	Screen Proyektoe	1
90	Foto Kepala - Kepala Bappeda Prov.Kaltim	9
91	LCD	7
92	Meja Panjang	3
93	Web Smart Switch Hub	1
94	AC	1
95	Power Amplifier	1
96	Server Pabx	1
97	Meja Segi Empat	1



No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
98	Sound System	1
99	Meja Podium	1
100	Meja Tambahan Kecil	1
101	Kursi Rapat Coklat	109
102	Layar Slide	2
103	Meja Makan	1
104	Lemari Kayu Sound System	1
105	Wireless Proyektor	1
106	Power Amplifier	1
107	Mixer	1
108	Kursi Rapat Biasa	63
109	Kursi Rapat Pimpinan	3
110	Mic Bosch	15
111	Meja Lipat	2
112	Amplifier	1
113	Switch Hub	1
114	Lemari Panel Automatic Swith Genset	1
115	Kapasitor Bank (Stationary Generating Set)	1
116	Mesin Genset Komatsu	1
117	Rak Besi	1
118	Meja	1
119	Kursi Panjang	2
120	Lampu Gantung	1
121	Load Speaker Kecil	2
122	Mesin Penghisap Debu	1
123	Speaker Luar	2
124	Amplifier	1
125	Meja Makan	4
126	Lampu Gantung	1
127	Amplify Player	1
128	Salon Carter	1



No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
129	Kursi Makan	50
130	Meja Makan bundar	10
131	PC Karaoke	1
132	Monitor	1
133	Microphone	6
134	Router / Microbyte	1
135	Cisco Switch Atas	1
136	Cisco Switch Bawah	1
137	Mikrobyte	1
138	IBM System X3650 M3	1
139	Dell Power Edge R420	1
140	Semi Jeep	5
141	Mini Bus	9
142	Mopen	3
143	Sepeda Motor	28
Jumlah		1.896

2.2.4. Unit Usaha Yang Masih Operasional

Unit usaha yang beroperasi di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur diantaranya Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kesuma Bangsa yang menjual sembilan bahan pokok, simpan pinjam dan sandang. Kantin Bappeda Prov. Kaltim yang menjual makanan siap saji untuk sarapan, makan siang dan menyediakan makan untuk kegiatan.



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Prov. Kaltim

Secara garis besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim, Kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. RPJMD 2019-2023
2. RENSTRA 2019-2023
3. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Prov.Kaltim
4. Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2018
5. Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK
6. Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS
7. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang SDA LH
8. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan
9. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata
10. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia
11. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial
12. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan
13. Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan
14. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang
15. koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman
16. koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman
17. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman
18. Laporan Budget Tagging Ekonomi Hijau

19. laporan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
20. Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPPRA dan LKPI
21. Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota
22. Dokumen Evaluasi RKPD
23. Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
24. Laporan penanggulangan kemiskinan
25. RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
26. laporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi)
27. laporan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi)
28. Laporan Kajian Pembangunan Infrastruktur dengan Pola Availability Payment
29. System SIPPD
30. Sistem Informasi Data (SIDATA) Bappeda Prov. Kaltim
31. *e –Library* Bappeda Prov. Kaltim
32. System One Data One Map

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Target	Tahun 2015	Target	Tahun 2016	Target	Tahun 2017	Target	Tahun 2018	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
1	Terlaksananya administrasi perkantoran	100 %	3.814,27		0,00	100 %	100 %	100 %				100 %	100 %			100 %	100 %	100 %				
2	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	5000 lembar	15,00		0,00	5000 lembar	5000 lembar	5000 lembar				5000 lembar	5000 lembar			100 %	100 %	100 %				
3	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan komunikasi, internet, air bersih, dan listrik (4 Jasa)	12 Bulan	713,00		0,00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan			100 %	100 %	100 %				
4	Jumlah Bulan Terlaksananya Perijinan Surat Kendaraan R4 dan R2 yang diadministrasikan (20 R4 dan 30 R2)	12 Bulan	36,00		0,00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan			100 %	100 %	100 %				
5	Jumlah Bulan Jasa pelayanan kebersihan kantor dan taman	12 Bulan	677,70		0,00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan			100 %	100 %	100 %				
6	Jumlah Bulan Jasa perbaikan peralatan kerja (8 Jenis)	12 Bulan	133,57		0,00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan			100 %	100 %	100 %				
7	Jumlah Bulan Penyediaan ATK untuk kesekretariatan	12 Bulan	125,00		0,00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan			100 %	100 %	100 %				
8	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	50,00		0,00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan			100 %	100 %	100 %				
9	Jumlah Bulan Penyediaan lampu dan alat kelistrikan	12 bulan	60,00		0,00	12 bulan	12 bulan	12 bulan				12 Bulan	12 Bulan			100 %	100 %	100 %				

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Realisasi					Capaian				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	K	K	K	K	K	K
(1)	(2)	12 Bulan	94.80		0.00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
10	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (BBM, Pelumas, Tabung Pemadatan)																			
11	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	600 eksemplar	65.00		0.00	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar			600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar
12	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 Bulan	205.00		0.00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
13	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 kegiatan	1,000.00		0.00	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan			30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan
14	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	14 kegiatan	500.00		0.00	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan			14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan
15	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan	12 Bulan	139.20		0.00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
16	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %	3,362.68		0.00	100 %	100 %	100 %			100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Jumlah kendaraan dinas		0.00		0.00	2 unit														
18	Jumlah perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	899.17		0.00	3 Jenis					3 Jenis				3 Jenis					
19	Jumlah peralatan gedung kantor	6 jenis	1,079.46		0.00	6 jenis	6 jenis	6 jenis			6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Target	Tahun 2015	Target	Tahun 2016	Target	Tahun 2017	Target	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2014	Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011	Tahun 2010
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
20	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan	12 bulan	75.00		0.00	12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				100%	100%					
21	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12 bulan	160.00		0.00	12 bulan	12 bulan	12 bulan			12 bulan	12 bulan	12 bulan			100%	100%	100%				
22	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	12 bulan	445.65		0.00	12 bulan	12 bulan	12 bulan			12 bulan	12 bulan	12 bulan			100%	100%	100%				
23	Jumlah Bulan Terpelihara Dokumen Arsip	12 bulan	116.40		0.00	12 bulan		12 bulan			12 bulan		12 bulan			100%	100%	100%				
24	Jumlah Bangunan yang direhab		0.00		0.00			1 unit				1 unit	1 unit				100%	100%				
25	Acara-acara Pemprov dan Perayaan Nasional yang difasilitasi	6 acara	542.00		0.00	6 acara	6 acara	6 acara			6 acara	6 acara	6 acara			100%	100%	100%				
26	Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2008	1 sertifikat	45.00		0.00	1 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat			1 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat			100%	100%	100%				
27	Terpenuhiya perlengkapan aparatur sipil negara	100 %	95.73		0.00	100 %	100 %	100 %			100 %		100 %			100%		100%				
28	Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		0.00		0.00	135 Stel		240 Stel			240 Stel		240 Stel			100%		100%				
29	Pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya yang diadakan		0.00		0.00		15 Stel															
30	Pakaian KORPRI beserta perlengkapannya yang diadakan	120 Stel	36.00		0.00		135 Stel															

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian					
		Target	Rp.	(3)	(4)	(5)	(6)	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
								Target	Target	Target	Target	Target	Target	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
(1)	(2)							(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
31	Pakaian Khusus beserta perlengkapannya yang diadakan	120 Stel	59.73		0.00	135 Stel	135 Stel	360 Stel							360 Stel						100%		
32	Meningkatnya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80 %	534.60		0.00	100%	90 %	100%					100%	100%	100%				100%	100.0%	100		
33	Dokumen CALK	1 Laporan	534.60		0.00	1 Laporan							1 Laporan						100%				
34	Dokumen LAKIP, RKT, PK		0.00		0.00		3 Dokumen	3 Dokumen						3 Dokumen	3 Dokumen					100%			
35	Dokumen LPPD		0.00		0.00		1 Dokumen	1 Dokumen						3Dok	1 Dokumen					100%			
36	Dokumen SOP Perencanaan (Bid.P3d,Bid.Stadal,Sekretariat,Bid.Perencana)		0.00		0.00		2 Dokumen							2 Dokumen						100%			
37	Terlayannya administrasi perkantoran		0.00	100%	6,000.00						100%	100%				100%	100%				100%	100%	
38	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran		0.00	12 Bulan	6,000.00					12 Bulan		12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%	
39	Terperuhnya Sarana dan Prasarana Aparatur		0.00	100%	2,600.00					100%	100%					100%	100%				100%	100%	
40	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		0.00	12 Bulan	2,600.00						12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%	
41	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		0.00	95%	3,160.00					90%	90%	90%				107%	6.67%				106.67%	7.41%	

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian			
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
												K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
42	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman		0.00	12 Bulan	1,660.00						12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	50%
43	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek		0.00	10 Orang	1,500.00						10 Orang				12orang	10orang				100%	100%
44	Jumlah Pakaian Olah Raga			120 Stelli							136 Stelli				167stell	180 Stelli				100%	100%
45	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		0.00	80%	500.00						80%				100%	125%				125%	
46	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran		0.00	10 Dokumen	350.00						10 Dokumen				10	10 Dokumen				100%	100%
47	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan			4 Dokumen							4 Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen				100%	100%
48	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan		0.00	4 Dokumen	150.00						4 Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen				100%	100%
49	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	82 %	7,801.84		0.00	86 %						86%					100%				
50	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	16 Dokumen	3,180.99		0.00	14 Dokumen						14 Dokumen					100%				
51	Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan (KDA, Bulletin, PDRB, dll)	80 %			0.00	82 %						82%					100%				
52	Penyusunan Dokumen KUA-PPAS, APBD, P-APBD tepat waktu	1 tepat waktu	3,627.80		0.00	1 tepat waktu						tepat waktu					100%				

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Target	Tahun 2015	Target	Tahun 2016	Target	Tahun 2017	Target	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
53	Pengelolaan website	1 Web	993.05		0.00	1 Web					1 Web					100%						
54	Jumlah Program Kerjasama yang di akomodir dalam dokumen perencanaan	60 %	3,098.80		0.00	65 %	70 %	70 %			65%	100%	100%			100%	142.86%	142.86%				
55	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK	1 Dokumen	3,098.80		0.00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%				
56	Jumlah Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat				0.00		10 kunjungan	10 kunjungan				10 kunjungan	10 kunjungan				100%					
57	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan Wilayah Pengembangan	67 %	5,674.09		0.00	70 %					70 %					100%						
58	Laporan koordinasi rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Laporan	3,173.48		0.00	1 Laporan					1 Laporan					100%						
59	Dokumen perencanaan kawasan industri pelabuhan internasional	1 Dokumen	2,500.61		0.00	1 Dokumen					1 Laporan					100%						
60	Presentase perencanaan pengembangan kab/kota	35 %	750.00		0.00	35 %					35%					100%						
61	Jumlah kab/kota yang berperan serta dalam perencanaan penanganan perumahan	1 kab/kota	200.00		0.00	1 kab/kota					1 kab/kota					100%						

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian					
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Target	Tahun 2015	Target	Tahun 2016	Target	Tahun 2017	Target	Tahun 2018	Tahun 2014	Target	Tahun 2015	Target	Tahun 2016	Target	Tahun 2017	Target	Tahun 2018
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)																						
62	Jumlah Kab/Kota yang berperan serta dalam perencanaan persiapan implementasi pembangunan air minum, drainase dan sanitasi	6 kab/kota	550.00		0.00	1 kab/kota								1 kab/kota									
63	Meningkatnya kemampuan perencanaan dan dokumen perencanaan	60 %	472.80		0.00	70 %	70 %	80 %						70 %	70 %	87 %			100%	100%	109.16%		
64	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	50 orang	397.80		0.00	50 orang	50 orang	50 orang						50 orang	50 orang	12 orang			100%	100%	24%		
65	Dokumen Analisis Jabatan	1 Dokumen	75.00		0.00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%		
66	Dokumen Renja dan Perubahan Renja		0.00		0.00		2 Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen	2 Dokumen				100%	100%		
67	Dokumen Renstra BAPPEDA/ Revisi Renstra BAPPEDA		0.00		0.00		1 Dokumen	1 Dokumen															
68	Dokumen RKA/DPA Murni dan Perubahan		0.00		0.00			4 Dokumen								4 Dokumen				100%			
69	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	0 tahapan	0.00		0.00	0 tahapan	0 tahapan	6 tahapan								6 tahapan				100%			
70	Penyediaan berita dan informasi pembangunan pada web bappeda dan media lain	0 bulan	0.00		0.00	0 bulan	0 bulan	12 bulan								12 bulan				100%			
71	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	73.06 %	10.916.25		0.00	77.23 %								77.23 %					100%				
72	Jumlah peserta yang menghadiri		0.00		0.00	600								600					100%				

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi								Capaian			
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
73	Terbitnya Peraturan daerah tepat waktu		0.00		0.00	Tepat waktu										100%							
74	Presentase hasil verifikasi dokumen Rancangan RKPD	90 %	1,300.00		0.00	90					90					100%							
75	Jumlah Peserta Rakor, Forum, Musrenbang Provinsi	250 / 400 / 600 orang	1,975.00		0.00	1250 orang					1250 orang					100%							
76	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan RKPD	1 Pergub	150.00		0.00	1 pergub					1 pergub					100%							
77	Dokumen LAKIP BAPPEDA, RKT, PK	3 Dokumen	450.00		0.00	3 dok					3 dok					100%							
78	Dokumen laporan LKPJ	1 Dokumen	975.00		0.00	1 dok					1 dok					100%							
79	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	1,597.25		0.00	1 dok					1 dok					100%							
80	Dokumen Hasil Pencapaian Pembangunan yang di Tindak Lanjuti	1 Dokumen	1,969.00		0.00	1 dok					1 dok					100%							
81	Dokumen laporan Gugus Kendali	1 Dokumen	1,000.00		0.00	1 dok					1 dok					100%							
82	Dokumen laporan TEPPA	1 Dokumen	1,500.00		0.00	1 dok					1 dok					100%							
83	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	82 %	7,801.84		0.00	86 %																	
84	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	16 Dokumen	3,180.99		0.00	14 Dokumen																	

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian						
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Target	Tahun 2015	Target	Tahun 2016	Target	Tahun 2017	Target	Tahun 2018	Tahun 2014	K	Tahun 2015	K	Tahun 2016	K	Tahun 2017	K	Tahun 2018	K
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
85	Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan (KDA, Bulletin, PDRB, dll)	80 %	0.00		0.00	82 %																		
86	Penyusunan Dokumen KUA-PPAS, APBD, P-APBD tepat waktu	1 tepat waktu	3,627.80		0.00	1 tepat waktu																		
87	Pengelolaan website	1 Web	993.05		0.00	1 Web																		
88	Jumlah Program Kerjasama yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	60 %	3,098.80		0.00	65 %	70 %	70 %			65 %													
89	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK	1 Dokumen	3,098.80		0.00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1	1 Dokumen				1 Dokumen								
90	Jumlah Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat				0.00		10 kunjungan	10 kunjungan				10 kunjungan				10 kunjungan								
91	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan	67 %	5,674.09		0.00	70 %																		
92	Laporan koordinasi rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Laporan	3,173.48		0.00	1 Laporan					1 Laporan													
93	Dokumen perencanaan kawasan industri pelabuhan internasional	1 Dokumen	2,500.61		0.00	1 Dokumen					1 Laporan													
94	Presentase perencanaan pengembangan kab/kota	35 %	750.00		0.00	35 %																		
95	Jumlah kab/kota yang berperan serta dalam perencanaan penanganan perumahan	1 kab/kota	200.00		0.00	1 kab/kota					1 kab/kota													



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi						Capaian					
		Rp.		Rp.		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018					
		Target	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K				
(1)	(2)	6 kab/kota	550.00	0.00	6 kab/kota	6	1 kab/kota	1 kab/kota	100%																
96	Jumlah Kab/kota yang berperan serta dalam perencanaan persiapan implementasi pembangunan air minum,																								
97	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	65 %	2,321.42	0.00	68 %		68 %																		
98	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor pembangunan dunia	6 Laporan	2,321.42	0.00	6 Laporan																				
99	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan	60 %	1,978.30	0.00	60 %		60 %																		
100	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1,428.30	0.00	1 Laporan																				
101	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Pendidikan	1 Laporan	550.00	0.00	1 Laporan																				
102	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	4 Dokumen	4,662.00	0.00	65%		65%																		
103	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	2 Dokumen	2,650.50	0.00	2 Dokumen		2 Dokumen																		
104	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Sektor Pengembangan prasarana wilayah	1 Dokumen	444.00	0.00	1 Dokumen		1 Dokumen																		

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian					
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
						Target	(8)	Target	(9)	Target	(10)	Target	(11)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
105	Dokumen perencanaan prasarana wilayah	1 Dokumen	1,567.50		0.00	1 Dokumen					1 Dokumen					100%							
106	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur	62 %	2,088.90		0.00	66 %					66 %					100%							
107	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan, Laporan hasil verifikasi Renja dan Renstra SKPD dan Dokumen Rencana Pembangunan	2 Dokumen	1,596.50		0.00	2 Dokumen					2 Dokumen					100%							
108	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Dokumen	492.40		0.00	1 Dokumen					1 Dokumen					100%							
109	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian				3,299.14		70 %	80 %				80%	100%				114.29%	125.00%					
110	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor PDU-EK		0.00		0.00	5 Laporan		5 Laporan				5 Laporan	5 Laporan				100%	100%					
111	Laporan Penganggaran Provinsi					10 Laporan		10 Laporan				10 Laporan	10 Laporan				100%	100%					
112	Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor PDU-EK					4 Laporan		4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan				100%	100%					
113	Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor PDU-EK					4 Laporan		4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan				100%	100%					

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi					Capaian				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Target	Tahun 2015	Target	Tahun 2016	Target	Tahun 2017	Target	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	K	K	K	K	K	K	K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
114	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor PDU-EK		0.00		0.00		1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%			
115	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor SDA-LH		0.00		0.00		5 Laporan	5 Laporan				5 Laporan	5 Laporan				100%	100%			
116	Laporan Penganggaran Provinsi						10 Laporan	10 Laporan				10 Laporan	10 Laporan				100%	100%			
117	Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor SDA-LH						4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan				100%	100%			
118	Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor SDA-LH						4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan				100%	100%			
119	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor SDA-LH		0.00		0.00		1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%			
120	Dokumen perencanaan kawasan industri berbasis pangan		0.00		0.00		2 Dokumen					2 Dokumen					100%				
121	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	0		0.95	1800					95%				100%					111.11%		
122	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH		0.00	4 Laporan	600.00				4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan					100%		
123	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Bid SDA LH			5 Laporan					5 Laporan	5 Laporan				5 Laporan					100%		



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi					Capaian				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Target	Tahun 2015	Target	Tahun 2016	Target	Tahun 2017	Target	Tahun 2018	Tahun 2014	Target	Tahun 2015	Target	Tahun 2016	Target	Tahun 2017	Target	Tahun 2018
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
124	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan		0.00	4 Laporan	600.00				4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan					100%				
125	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Bid Pertanian dan Perikanan			5 Laporan					5 Laporan	5 Laporan				5 Laporan					100%				
126	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata		0.00	4 Laporan	600.00				4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan					100%				
127	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata			5 Laporan					5 Laporan	5 Laporan				5 Laporan					100%				
128	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian		0.00		3.299.14					90%					110%					112%			
129	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH									1 laporan					1 laporan								
130	Jumlah Laporan Budget Tagging Ekonomi Hijau									1 laporan					1 laporan								
131	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan									1 laporan					1 laporan								
132	Jumlah laporan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi									1 laporan					1 laporan								

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi				Capaian			
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun	Target	Tahun	Target	Tahun	K	Tahun	K	Tahun	K	Tahun	K
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015
133	(2) Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
									4 Laporan						4 Laporan		
134	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata								1 laporan						1 laporan		
135	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan Wilayah Pengembangan		0.00		0.00		75 %	77 %				111.25%	100%			148.33%	129.87%
136	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Prasarana Wilayah		0.00		0.00		5 Laporan	5 Laporan				5 Laporan	5 Laporan				100%
137	Laporan Penganggaran Provinsi						10 Laporan	10 Laporan				10 Laporan	10 Laporan				100%
138	Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Prasarana Wilayah						4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan				100%
139	Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Prasarana Wilayah						4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan				100%
140	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Prasarana Wilayah		0.00				1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen				100%
141	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Pengembangan Wilayah		0.00		0.00		5 Laporan	5 Laporan				5 Laporan	5 Laporan				100%



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian						
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Target	Tahun 2015	Target	Tahun 2016	Target	Tahun 2017	Target	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
142	Laporan Penganggaran Provinsi						10 Laporan	10 Laporan				10 Laporan	10 Laporan					100%						
143	Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pengembangan Wilayah						4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan					100%						
144	Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pengembangan Wilayah						4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan					100%						
145	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah				0.00		1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen					100%						
146	Roadmap Air Minum Provinsi Kalimantan Timur				0.00		1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen					100%						
147	Kertas Kerja BKPRD Provinsi Kalimantan Timur				0.00		1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen					100%						
148	Dokumen perencanaan kawasan industri pelabuhan internasional		0.00		0.00		1 Dokumen	0				1 Dokumen	0											
149	Jumlah data statistik dan spasial yang dipublikasikan	0	0.00		0.00	0	0	600 data				0	600 data					100%						
150	Terselenggaranya Forum One Data One Map							2 Forum					2 Forum					100%						
151	Terselenggaranya Rakor One Data One Map							2 Rakor					2 Rakor					100%						
152	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur		0.00				70%	80%				100%	100%				142.86%	125%						

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian					
		Rp.		Rp.		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
(1)	(2)					4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan				100%	100%						
153	Laporan Akhir Tahun Kegiatan, Laporan Kegiatan Penilaian RKPD Kab/Kota (Pangripta), Laporan Hasil Survey IPK, Laporan Hasil																						
154	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pemerintahan					5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan			5 Laporan	5 Laporan				100%	100%						
155	Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pemerintahan					10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan			10 Laporan	10 Laporan				100%	100%						
156	Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pemerintahan					4 laporan	4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan				100%	100%						
157	Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pemerintahan					4 laporan	4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan				100%	100%						
158	Dokumen perencanaan pembangunan sektor Aparatur					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%						
159	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Aparatur					5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan			5 Laporan	5 Laporan				100%	100%						
160	Laporan Penganggaran Provinsi sektor Aparatur					10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan			10 Laporan	10 Laporan				100%	100%						
161	Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Aparatur					4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan				100%	100%						
162	Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Aparatur					4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan				100%	100%						

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian					
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Target	Tahun 2015	Target	Tahun 2016	Target	Tahun 2017	Target	Tahun 2018	Tahun 2014	Target	Tahun 2015	Target	Tahun 2016	Target	Tahun 2017	Target	Tahun 2018
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)																		
163	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		0.00		0.00		63.00%										100%	100%	148%				
164	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Kesejahteraan Rakyat		0.00		0.00		5 Laporan	5 Laporan									5 Laporan	5 Laporan	100%	100%			
165	Laporan Penganggaran Provinsi						10 Laporan	10 Laporan									10 Laporan	10 Laporan	100%	100%			
166	Laporan Trivulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Kesejahteraan Rakyat						4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan	4 Laporan	100%	100%			
167	Laporan Trivulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Kesejahteraan Rakyat						4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan	4 Laporan	100%	100%			
168	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Kesejahteraan Rakyat				0.00		1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%			
169	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/kota Sektor Pendidikan, Mental dan		0.00		0.00		5 Laporan	5 Laporan									5 Laporan	5 Laporan	100%	100%			
170	Laporan Penganggaran Provinsi						10 Laporan	10 Laporan									10 Laporan	10 Laporan	100%	100%			
171	Laporan Trivulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual						4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan	4 Laporan	100%	100%			
172	Laporan Trivulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pendidikan, Mental dan						4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan	4 Laporan	100%	100%			

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi						Capaian				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Target	Tahun 2015	Target	Tahun 2016	Target	Tahun 2017	Target	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
(1)	(2)							1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen	1 Dokumen				100%			
173	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual							1 Laporan	1 Laporan							1 Laporan	1 Laporan				100%			
174	Koordinasi Bidang Pendidikan		0.00																		100%			
175	Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah tahunan		0.00		3,551.50			100 %	100 %							100%	117%	TIDAK dipakai 2017			100%	116.70%		
176	Dokumen Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir RKPD		0.00		1,151.50			3 Dokumen	3 Dokumen							3 Dokumen	3 Dokumen				100%	100%		
177	Jumlah unsur pemangku kepentingan yg mengikuti Konsultasi Publik				0.00			4 unsur	4 unsur							4 unsur	4 unsur				100%	100%		
178	Jumlah peserta yang menghadiri Rakor Program Prioritas		0.00		2,250.00			250 orang	250 orang							250 orang	250 orang				100%	100%		
179	Jumlah peserta yang menghadiri Forum SKPD				0.00			450 orang	450 orang							450 orang	450 orang				100%	100%		
180	Jumlah peserta yang menghadiri Musrenbang RKPD				0.00			600 orang	600 orang							600 orang	600 orang				100%	100%		
181	Pergub Penetapan RKPD		0.00		150.00	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub							1 Pergub	1 Pergub				100%	100%		
182	Persentase Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang		0.00		0.00				100 %								100%					100%		
183	Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD								1 dokumen								1 dokumen				100%	100%		
184	Perda Perubahan RPJPD								1 dokumen								1 dokumen				100%	100%		
185	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang		0.00		0.00				100 %								100%					100%		
186	Dokumen Rancangan Perubahan RPJPD		0.00		0.00				1 Dokumen								1 Dokumen					100%		

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian			
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	1 Perda	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
187	Perda Perubahan RPJPD		0.00		0.00			1 Perda						1 Perda					100%		
188	Persentase penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah yang efektif		0.00		0.00		66.7	100 %					100 %	100 %				150%	100%		
189	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS		0.00		0.00		8 Dokumen	8 Dokumen					8 Dokumen	8 Dokumen				100%	100%		
190	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah		0.00	1.00	8,747.50		83.83%	87.89%	75%				100%	100%				100%	114.94%		
191	Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPPA dan LKPJ						5 dokumen	5 dokumen					5 dokumen	5 dokumen				100%	100%		
192	Dokumen laporan gugus kendali						1 Dokumen						1 Dokumen					100%			
193	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah		0.00	0.80	1,500.00				75%	80%					67%				88.89%		
194	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPPA dan LKPJ		0.00	0.00	1,000.00			3 Dokumen	3 Dokumen						3 Dokumen	3 Dokumen			100%	100%	
195	Dokumen laporan gugus kendali						1 dokumen						1					100%			
196	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota		0.00	6 laporan	500.00			6 laporan	6 laporan	6 laporan					6 laporan	6 laporan			100%	100%	

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian			
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	K	K	K	K	K	(12)	(13)
(1)	(2)																				
197	Dokumen Evaluasi RKPD				1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen	1 dokumen	
198	Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)		0.00				100%	100%										100%	100%		
199	Dokumen perencanaan daerah Kab/Kota yang rendah Karbon (RAD/GRK)		0.00		0.00	1 Dokumen	2 Dokumen										1 Dokumen	2 Dokumen			
200	Kelembagaan Penurunan Emisi di Kab/Kota		0.00		0.00	1 Kab/Kota	2 Kab/Kota										1 Kab/Kota	2 Kab/Kota			
201	Kab/Kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan		0.00	2 Kabupaten	600.00				100%	2 Kabupaten									100%		
202	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Pokja Pembangunan Ekonomi Hijau		0.00	2 Kabupaten	300.00				2 Kabupaten	2 Kabupaten									2 Kabupaten		
203	Dokumen perencanaan daerah yang rendah karbon		0.00	2 Dokumen	300.00				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
204	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		0.00	0.90	2.747.48				90%	90%									100%	111%	
205	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia		0.00	4 Laporan	606.30				4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan		

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	K	K	K	K	K	K	K	K
(1)	(2)																					
197	Dokumen Evaluasi RKPD			1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen	100%		
198	Kab/kota yang mengutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)		0.00				100%	100%														
199	Dokumen perencanaan daerah Kab/Kota yang rendah Karbon (RAD/GRK)		0.00		0.00		1 Dokumen	2 Dokumen														
200	Kelembagaan Penurunan Emisi di Kab/Kota		0.00		0.00		1 Kab/Kota	2 Kab/Kota														
201	Kab/Kota yang mengutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan		0.00	2 Kabupaten	600.00				100%	2 Kabupaten									100%			
202	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Pokja Pembangunan Ekonomi Hijau		0.00	2 Kabupaten	300.00				2 Kabupaten	2 Kabupaten									2 Kabupaten	100%		
203	Dokumen perencanaan daerah yang rendah karbon		0.00	2 Dokumen	300.00				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen	100%		
204	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		0.00	0.90	2.747.48				90%	90%									100%	111%		
205	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia		0.00	4 Laporan	606.30				4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan			

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi					Capaian				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
206	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia			5 Laporan					5 Laporan	5 Laporan				5 Laporan							
207	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Sektor Kesejahteraan Sosial		0.00	5 Laporan	900.00				5 Laporan	5 Laporan				5 Laporan							
208	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial			4 Laporan					4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan							
209	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan		0.00	4 Laporan	1,241.18				4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan							
210	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Pemerintahan			5 Laporan					5 Laporan	5 Laporan				5 Laporan							
211	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		0.00	0.90	2,747.48				0.00	90%					100%					111%	
212	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia		0.00	4 Laporan	606.30				1 laporan	1 laporan					1 laporan					100%	
213	Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur			5 Laporan					1 laporan	1 laporan					1 laporan					100%	

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi				Capaian						
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
214	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial		0,00	5 Laporan	900,00					1 laporan					1 laporan					100%
215	Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan			4 Laporan						1 laporan					1 laporan					100%
216	Jumlah RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan									1 laporan					1 laporan					100%
217	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan		0,00	4 Laporan	1.241,18					1 laporan					1 laporan					100%
218	Jumlah laporan anugerah Pangripta Nusantara			5 Laporan						1 laporan					1 laporan					100%
219	Jumlah laporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi)									1 laporan					1 laporan					100%
220	jumlah laporan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi)									1 laporan					1 laporan					100%
221	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	0		0,95	1500				90%	95				100%					111%	
222	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan		0,00	4 Laporan	600,00				1 Laporan	4 Laporan				1laporan					100%	



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi					Capaian				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Target	Tahun 2015	Target	Tahun 2016	Target	Tahun 2017	Target	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
223	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Prasarana Perhubungan			5 Laporan					5 Laporan	5 Laporan				2laporan					100%		
224	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang		0,00	4 Laporan	600,00				1Laporan	4 Laporan				1laporan					100%		
225	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang			5 Laporan					5 Laporan	5 Laporan				5 laporan					100%		
226	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman		0,00	4 Laporan	300,00				1 Laporan	4 Laporan				1 laporan					100%		
227	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Prasarana Perumahan dan Pemukiman			5 Laporan					5 Laporan	5 Laporan				5 laporan					100%		
228	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	0	0	0,95	1500				0	90%				100%					111%		
229	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan									4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan				100%		
230	Laporan Kajian Pembangunan Infrastruktur dengan Pola Availability Payment									1 laporan				1 laporan	1 laporan				100%		

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian					
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
231	laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang									4 laporan					4 laporan					100%			
232	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang									1 laporan					1 laporan					100%			
233	laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman									1 laporan					1 laporan					100%			
234	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Prasarana Perumahan dan Pemukiman									1 laporan					1 laporan					100%			
235	Presentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah tahunan		0.00	1.00	8,747.50				90%	97%				100%	100%				111%	103%			
236	Dokumen Ranc. Awal, Ranc. Akhir RKPD dan RKPD								4 dokumen				4 dokumen						100%				
237	Dokumen RKPD Prov. Kalimantan Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2018		0.00	2 dokumen	910.00					2 dokumen					2 dokumen					100%			
238	Jumlah unsur pemangku kepentingan yg mengikuti Konsultasi Publik		0.00						4 dokumen					4 dokumen					100%				



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian			
		Target		R.p.		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
239	Dokumen Revisi RPJMD								1 dokumen					1 dokumen						100%	
240	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Prov. Kaltim		0.00	20 dokumen	1,500.00					20 dokumen						20 dokumen					
241	Jumlah peserta yang menghadiri Rakor Program Prioritas								250 orang						250 orang					100%	
242	Jumlah peserta yang menghadiri Forum SKPD								450 orang						450 orang					100%	
243	Jumlah peserta yang menghadiri Musrenbang RKPD								600 orang						600 orang					100%	
244	Jumlah pelaksanaan forum RKPD yang dilakukan		0.00	3 Tahapan	2,250.00					3 Tahapan						3 Tahapan					100%
245	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK		0.00	1 dokumen	846.00				1 dokumen	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen				100%	100%
246	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi		0.00	6 tahap	1,000.00				6 tahap	6 tahap					6 tahap	6 tahap				100%	100%

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian				
		Rp.		Rp.		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
247	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS		0.00	8 dokumen	2,000.00			8 dokumen	8 dokumen				8 dokumen	8 dokumen				100%	100%	100%		
248	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan		0.00		0.00		88 %	89%				100%	100				125%					
249	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan		0.00		0.00		14 Dokumen	14 Dokumen				14 Dokumen					100%					
250	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi		0.00		0.00		5 tahap					5 tahap					100%					
251	Jumlah data statistik dan spasial yang dipublikasikan		0.00		0.00		400					400					100%					
252	Penyediaan berita dan informasi perencanaan pembangunan pada web Bappeda dan media lainnya		0.00		0.00		12 bulan					12 bulan					100%					
253	Terlaksananya administrasi perkantoran		0.00	1.00	1,250.00				90%	90%				100%	110%			111.11%	122%			
254	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan		0.00	14 dokumen	750.00			14 dokumen	14 dokumen				14 dokumen	14 dokumen				100%	100%	100%		
255	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Geospasial Tematik		0.00	200 IGT	500.00			150 IGT	200 IGT				50 IGT	30IGT				33.330%		15%		

Tabel 2.4
Anggaran, Realisasi Dan Capaian Pendanaan Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Pada Tahun						Capaian Pada Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6			8	9	10	11		12	13	14	15	16
BELANJA DAERAH	62,706,528,300	62,239,647,680	50,943,688,850	39,036,104,361.31	47,458,683,228			58,300,771,031	47,110,040,101	36,048,784,022	44,790,960,090		92.85%	93.67%	92.47%	92.35%	94.38%
BALANJA TIDAK LANGSUNG	12,992,239,000	12,914,647,680	13,998,015,850	14,178,107,000	13,703,717,000			12,202,394,763	12,654,604,297	12,190,217,333	12,885,873,682		92.03%	94.48%	90.40%	85.98%	94.03%
- Belanja pegawai	12,992,239,000	12,914,647,680	13,998,015,850	14,178,107,000	13,703,717,000			12,202,394,763	12,654,604,297	12,190,217,333	12,885,873,682		92.03%	94.48%	90.40%	85.98%	94.03%
BELANJA LANGSUNG	49,774,289,300	49,325,000,000	36,945,673,000	24,857,997,361	33,754,966,228			46,098,376,268	34,455,435,804	23,858,566,689	31,905,086,408		93.07%	93.46%	93.20%	95.98%	94.52%
- Belanja Pegawai	13,385,545,000	9,861,750,000	8,483,030,000	5,541,700,000	7,923,700,000			8,658,120,000	7,762,279,000	5,391,247,500	7,559,260,000		88.85%	89.82%	91.50%	97.29%	95.40%
- Belanja Barang dan Jasa	32,200,636,300	28,857,250,000	24,710,296,000	16,867,853,836.31	23,711,201,700			27,215,221,668	22,955,071,804	16,154,308,589	22,258,571,660		94.72%	94.31%	92.90%	95.77%	93.87%
- Belanja Modal	4,188,108,000	10,606,000,000	3,752,347,000	2,448,443,525	2,120,064,528			10,025,035,000	3,738,085,000	2,313,010,600	2,087,254,748		93.84%	94.52%	99.62%	94.47%	98.45%
TOTAL	62,706,528,300	62,239,647,680	50,943,688,850	39,036,104,361.31	47,458,683,228			58,300,771,031	47,110,040,101	36,048,784,022	44,790,960,090		92.85%	93.67%	92.47%	92.35%	94.38%

2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi Bappeda Prov. Kaltim. Tantangan yang masih dihadapi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
2. Proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lebih lambat dari penyusunan dokumen anggaran (Renja belum jadi, dokumen anggaran sudah jadi dalam aplikasi SIPPD)
3. Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara online (Aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi)
4. Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid
5. Proses updating data pada aplikasi yang lambat
6. Data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap, akurat dan valid.
7. Proses *updating* data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat
8. Keterbatasan staf teknis terkait analisis monitoring dan evaluasi
9. Keterbatasan tenaga analis data dan informasi
10. Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim

Berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Kewenangan Kepala Badan yaitu Penyusunan Kebijakan, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan, Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan, pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian, mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kab/Kota, dan Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isu isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan sebuah dinamika kehidupan dan menjadi pokok pembahasan dan perlu menjadi perhatian , sehingga permasalahan pembangunan dapat diantisipasi sedini mungkin. Oleh sebab itu, dalam mengemban tugas dan perannya Bappeda harus memperhatikan isu strategis yang dapat berkembang saat ini hingga lima tahun mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim, terdapat permasalahan dan tantangan, antara lain:



1. Kurang cermatnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang disebabkan oleh perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya.
2. Belum terintegrasinya program kegiatan antar sektor/bidang pembangunan baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang disebabkan oleh proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lebih lambat dari penyusunan dokumen anggaran (Renja belum jadi, dokumen anggaran sudah jadi dalam aplikasi SIPPD)
3. Keterbatasan data (spasial dan statistik) yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan yang disebabkan oleh : (1) Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid; (2) Keterbatasan tenaga analis data dan informasi; (3) proses *updating* data pada aplikasi yang lambat;
4. Keterlambatan proses evaluasi dan pelaporan: (1) Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara *online* (Aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi); (2) Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik; (3) Keterbatasan staf teknis terkait analisis monitoring dan evaluasi; (4) Proses *updating* data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat
5. Keterbatasan data hasil capaian program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk proses evaluasi pengendalian pembangunan daerah yang disebabkan oleh data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap, akurat dan valid.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, diperoleh dari analisis seperti pada tabel 3.1 sebagai berikut :



Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

MISI	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK	Masih terdapat inkonsistensi perencanaan dan penganggaran	Kurang cermatnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran	Perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
		Belum terintegrasinya program kegiatan antar sektor/bidang pembangunan baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota	Proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lebih lambat dari penyusunan dokumen anggaran (Renja belum jadi, dokumen anggaran sudah jadi dalam aplikasi SIPPD)
		Keterbatasan data (spasial dan statistik) yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan	Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid
	Keterbatasan tenaga analis data dan informasi		
	Proses <i>updating</i> data pada aplikasi yang kurang cepat		
	Belum optimalnya capaian target pembangunan sesuai dengan rencana	Keterlambatan proses evaluasi dan pelaporan	Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara <i>online</i> (Aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi)
			Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik
			Keterbatasan staf teknis terkait analisis monitoring dan evaluasi



MISI	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
			proses <i>updating</i> data hasil capaian pelaksanaan progam dan kegiatan yang lambat

Untuk menjawab masalah permasalahan diatas dan mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, Bappeda Prov. Kaltim diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, efektif dan efisien. Sehingga dalam peaksanaannya diperlukan keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan pembangunan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta Visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur, selaras dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur kedepan ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera



Tabel 3.2. Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Visi RPJPD 2005-2025	Visi RPJMN 2015-2019	Visi RPJMD 2019-2023
Pembangunan Berkelanjutan Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan	Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- royong	Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat

Tabel 3.3. Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat	Berani	Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat
	Berdaulat	Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
		Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing



B. Misi Daerah

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1: BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING, TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS			
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berdaya saing	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Memperkokoh ketahanan budaya melalui pengembangan nilai agama, seni, nilai tradisi, pendidikan karakter dan bahasa	Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal
			Peningkatan penanganan masalah kesehatan jiwa
			Optimalisasi fungsi taman budaya dan anjungan budaya kaltim
	Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi dokter dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan (3T)
			Peningkatan fungsi dan pengelolaan RSI Samarinda sebagai RSUD
			Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan
			Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkat dan meratanya akses, kualitas dan relevansi pendidikan	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras dengan kebutuhan pasar kerja dengan penguatan penerapan kurikulum berbasis pembelajaran keterampilan
			Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui beasiswa Kaltim Tuntas
			Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/MA, dan Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (<i>Boarding School</i>)
			Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi dan insentif
		Optimalisasi perlindungan anak	Penyediaan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan perlindungan anak
	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Peningkatan pengarusutamaan gender	Peningkatan kesadaran kesetaraan gender di kalangan masyarakat
			Optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
	Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Peningkatan prestasi keolahragaan dan seni budaya	Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi
		Peningkatan kesempatan pemuda berwirausaha	Pengembangan karya seni budaya pemuda
	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda
			Peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja
			Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja
		Optimalisasi penyaluran tenaga kerja	
MISI 2: BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN			
Meningkatkan ekonomi kerakyatan	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat miskin dalam kemandirian berusaha	Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi	Peningkatan Kualitas Bantuan dan Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; Peningkatan kualitas hidup perempuan miskin
			Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	Peningkatan Produksi pangan pada lahan potensial dan pemanfaatan lahan kritis melalui kemitraan	Peningkatan produktifitas pangan berkelanjutan
	Meningkatnya usaha ekonomi rakyat	Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM
			Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola Kemitraan dan pendampingan.
			Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
		Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan ekosistem tropis	Peningkatan promosi dan paket wisata dan mengembangkan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase budaya dan pariwisata Kaltim
			Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Terwujudnya hilirisasi hasil pengolahan sumberdaya alam	Peningkatan realisasi nilai investasi sektor industri pengolahan untuk membuka lapangan kerja baru sektor industri hilir	Pengembangan Industri Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Pertanian
			Perluasan akses pasar, jaringan dan kemitraan di dalam dan luar negeri
	Meningkatnya <i>output</i> ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan	Peningkatan nilai tambah dan daya saing Komoditi Unggulan Daerah	Peningkatan produktivitas lahan perkebunan
			Peningkatkan pemanfaatan limbah Perkebunan
			Pengelolaan kelautan dan Perikanan berkelanjutan
			Peningkatan produksi dan daya saing produk peternakan
			Memperkuat pengelolaan hutan oleh masyarakat untuk mendukung ekonomi kerakyatan
	Pengembangan multi-produk hutan		
	MISI 3: BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN		
Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Energi Daerah	Peningkatkan ketersediaan energi dengan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Pengembangan Kelistrikan di daerah pedesaan dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (Bio Gas, Matahari, Air, Angin)



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Perbaikan Tata niaga pengelolaan BBM	Peningkatan efisiensi distribusi BBM
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih	Peningkatan akses air baku, air minum dan sanitasi layak	Peningkatan infrastruktur penyediaan air baku dan layanan air minum
	Meningkatnya konektifitas antar kawasan dan daerah 3T	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung konektivitas pusat-pusat pertumbuhan	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan Provinsi kelas 1
			Peningkatan Pelabuhan Internasional Kariangau Balikpapan menjadi Pelabuhan Ekspor Internasional dengan Penuntasan aksesibilitas dan konektivitas transportasi antara sentra produksi ke kawasan industri
			Pemerataan dan peningkatan akses dan infrastruktur TIK
MISI 4: BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya emisi GRK	Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
			Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan ruang
			Peningkatan Upaya Perlindungan Lahan Berhutan Alam dan Gambut
			Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui kemitraan swasta dan masyarakat
			Mempertahankan Lahan berhutan di pola ruang perkebunan
	Meningkatnya kualitas Sumber Air Baku	Peningkatan Daya dukung Sumber Daya Air	Peningkatan Upaya Rehabilitasi DAS Kritis Peningkatan fungsi Danau Danau Jempang, Semayang dan Melintang
	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Peningkatan pengamanan kawasan rawan banjir	Penanganan banjir terpadu di kawasan pusat pertumbuhan ekonomi
MISI 5: BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK			
Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional	Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas sistem penunjang akuntabilitas kinerja	Peningkatan pelaksanaan e-SAKIP



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
dan berorientasi pelayanan publik	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan kualitas tata laksana pelayanan publik	Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap perangkat daerah
			Peningkatan inovasi pelayanan publik melalui Pemberian insentif/reward bagi perangkat daerah dan kabupaten/kota inovatif
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Peningkatan Kesadaran Guna Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
			Peningkatan pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Sembilan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, meliputi:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan
3. Penguatan kapasitas pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas dalam pembangunan
4. Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi
5. Peningkatan produktifitas pangan berkelanjutan

6. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah
7. Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar
8. Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup
9. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah

C. Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur

Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (*Dedicated Program*)

Program prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Adapun program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu :

1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi paripurna
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (*Boarding School*)
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan
6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA
7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas
9. Peningkatan perlindungan anak
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa

15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur
26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat
30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara

33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis
35. Peningkatan kinerja aparaturng sipil negara (ASN)
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

3.3. Penelaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Prov. Kaltim

Sebagaimana di amanatkan dalam RPJMN 2015-2019, Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI,
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Melalui amanat tersebut, review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Rencana Strategis Bappeda tetap mengacu pada Renstra Kementerian BPPN/Bappenas

3.4. Penelaahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RPJPD harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No.86 Tahun 2017). Berikut adalah penelaahan RTRW yang digunakan sebagai basis penentuan lokasi pada arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur:

3.4.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan prasarana utama, dan pengembangan jaringan prasarana lainnya. Pengembangan sistem perkotaan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pengembangan sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten/kota.

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan bertujuan untuk menetapkan struktur sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten atau kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan IV-2 Timur. Selain itu, penetapan rencana sistem perkotaan juga bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi perkotaan antar wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pengembangan sistem perkotaan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

b. Rencana Jaringan Transportasi

Rencana jaringan transportasi merupakan bagian dari sistem jaringan prasarana utama. Pengembangan sistem jaringan prasarana utama bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan sosial-budaya penduduk. Sistem jaringan prasarana utama berikut dikembangkan berdasarkan struktur perkotaan yang akan dibentuk dan diintegrasikan dengan wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur. Sistem jaringan prasarana utama di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas jaringan transportasi darat; jaringan transportasi laut; dan jaringan transportasi udara.

b.1. Jaringan Transportasi Darat

b.2. Transfortasi Sungai, Danau dan Penyebrangan

b.3. Transportasi Laut

b.4. Transportasi Udara

c. Rencana Jaringan Energi/ Kelistrikan

Selain didukung dengan jaringan prasarana utama yang terdiri dari berbagai jaringan moda transportasi, kelayakhunian wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh jaringan energi. Jaringan energi di Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk mendukung pemenuhan energi listrik dan IV-4 energi lainnya. Jaringan energi dalam hal ini terdiri dari pembangkit tenaga listrik; gardu induk; jaringan transmisi tenaga listrik; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi. Pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial; pengembangan energi baru dan terbarukan; serta pengembangan listrik pedesaan. Sementara itu, pengembangan transmisi tenaga listrik dikembangkan melalui pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda – Balikpapan; serta pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 kV. Selanjutnya pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan melalui pengembangan dan



pemeliharaan pipa gas bumi serta pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang mampu menghubungkan sumur-sumur migas langsung ke unit penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk. Selain itu, pembangunan 5 (lima) tahun kedepan perlu memperhatikan rencana pengelolaan sumberdaya energi untuk pemenuhan kebutuhan listrik dan energi. Rencana tersebut didukung dengan melakukan pembatasan kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET serta penetapan ketentuan radius pengembangan.

d. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah, ketersediaan jaringan jalan dan sarana transportasi perlu didukung oleh ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai. Jaringan telekomunikasi dalam hal ini merupakan perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan publik. Jaringan telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari jaringan terestrial; jaringan nirkabel; dan jaringan satelit. Pengembangan jaringan tersebut diarahkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dan memudahkan akses antar wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*). Selain itu, pengembangan jaringan telekomunikasi juga diarahkan pada pengembangan tower BTS (*Base Transceiver Station*).

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Ketersediaan sumber daya air merupakan prasyarat krusial dalam menciptakan kelayakhunian pemukiman. Selain itu, sumber daya air juga penting sebagai salah satu sumber energi. Sistem jaringan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur meliputi pengelolaan daerah aliran sungai; konservasi sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air; dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai. Selanjutnya, pengembangan sistem jaringan sumberdaya air



diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak yang diprioritaskan. Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

3.4.2 Penelaahan Terhadap Rencana Pola Ruang

Berkaitan dengan distribusi peruntukan ruang di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat dua kategori pola ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

a. Rencana Kawasan Lindung

Penetapan kawasan lindung Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- a.1.Kawasan Lindung Bawahan
- a.2.Kawasan Lindung Setempat
- a.3.Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- a.4.Kawasan rawan bencana alam
- a.5.Kawasan lindung geologi
- a.6. Kawasan lindung lainnya

b. Rencana Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis

Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas 10.451.331 Ha yang terbagi menjadi 8 kategori yaitu:

- b.1. Kawasan peruntukan hutan produksi
- b.2. Kawasan peruntukan pertanian
- b.3. Kawasan peruntukan perikanan
- b.4. Kawasan peruntukan industri
- b.5. Kawasan peruntukan pariwisata
- b.6. Kawasan peruntukan pemukiman
- b.7. Kawasan peruntukan pertambangan
- b.8. Kawasan peruntukan lainnya

3.5 Perumusan Isu- Isu Strategis Bappeda Prov. Kaltim

Berdasar pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, terkait tugas dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim, maka dirumuskan isu- isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Prov. Kaltim dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitas dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang terintegrasi
3. Meningkatkan kualitas SDM
4. Penyediaan dan pemutakhiran data/informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan
5. Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan serta pemanfaatan sistem informasi pengendalian pembangunan
6. Percepatan pelaporan melalui sistem aplikasi monitoring dan evaluasi
7. Penyediaan dan pemutakhiran data/informasi hasil capaian program dan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan Visi dan Misi jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen Renstra OPD. Visi dan Misi tersebut akan menjadi pondasi awal kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait bidang masing-masing serta menjadi target-target kinerja untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Visi kelembagaan akan menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal lembaga/instansi di masa depan (*clarity of direction*) sebagai dukungan sistem birokrasi maupun pelayanan publik terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Pernyataan Visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai target masa depan yang diharapkan akan mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil. Misi yang harus diemban merupakan dasar dari sasaran pembangunan oleh pemerintah daerah sekaligus mengawali penyusunan program/kegiatan dalam perencanaan kinerja kelembagaan.

4.1. Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur

Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur tertuang dalam RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023, yaitu :

“BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT”

Pada tahapan selanjutnya, Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi Provinsi Kalimantan Timur. Misi Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Berdaulat dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan
4. Berdaulat dalam pengelolaan Sumberdaya alam yang berkelanjutan



5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi publik.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA Prov. Kaltim, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian Visi dan Misi. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Tujuan merupakan salah satu komponen dalam perencanaan strategis sehingga perlu dirumuskan gambaran tentang keadaan yang diinginkan selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Provinsi seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan Visi dan Misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing Misi.

Adapun **tujuan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023** adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien”, dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja Provinsi (SAKIP Provinsi).

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan hingga periode lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra, dapat diturunkan menjadi sasaran-sasaran perencanaan pembangunan yang efektif dan spesifik serta memiliki indikator yang dapat diukur sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan selanjutnya. Berdasarkan tujuan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023, maka **Sasaran** yang ingin dicapai BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota, dengan indikator proporsi



rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota.

2. Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah, dengan indikator persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur.
3. Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah, dengan indikator persentase kebijakan rencana pembangunan yang berbasis data sektor dan spasial.



Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
Visi : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT									
MISI 5 : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Publik									
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien		Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi (SAKIP Provinsi)	77,49	77,50	78,00	78,50	79,00	80,00	80,00
S1.	Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	Proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	85%	87%	89%	92%	94%	96%	96%
S2.	Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembanbgunan RPJMD Kalimantan Timur	80%	85%	89%	91%	95%	100%	100%
S3.	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	60%	63%	67%	70%	75%	80%	80%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Prov. Kaltim, diperlukan strategi dan kebijakan yang pro-pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan pembangunan. Penyusunan strategi dan kebijakan melibatkan keseluruhan bidang-bagian karena dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang maupun bidang-bagian. Hal tersebut dipandang perlu, karena koordinasi dan sinkronisasi akan sangat mempengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan dalam meraih visi yang diemban.

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat *incremental* (terus meningkat), taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas, dan periode waktu dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat.

Dalam pencapaian Visi dan Misi, BAPPEDA Prov. Kaltim memiliki strategi-strategi yang dihasilkan dari analisis maupun kajian baik pada evaluasi pembangunan daerah periode sebelumnya, isu-isu dan permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi, hingga dampak positif maupun negatif dari program/kegiatan pendukung pembangunan daerah. Strategi untuk mencapai Visi dan Misi BAPPEDA Prov. Kaltim dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths-Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan dalam mencapai cita-cita pembangunan. Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil,



produk, atau fungsi dari suatu kesepahaman melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BAPPEDA Prov. Kaltim menyusun strategi dan arah kebijakan dari hasil analisis Memetakan Masalah Ke Masalah ke Arsitektur/Piramida Permasalahan. Dari hasil analisis tersebut didapatkan strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	1. Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	1. Mengintensifkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran	Perubahan tata laksana Musrenbang, Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan Daerah lainnya
		2. Meningkatkan kualitas SDM Perencana	Meningkatkan pelatihan SDM Perencana
	2. Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah	1. Mengintegrasikan sistem perencanaan dan kerjasama pembangunan tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas pengendalian kinerja pembangunan daerah



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	3. Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang terintegrasi	Integrasi aplikasi siData, SIPD dengan SIPPD, TEPR dan Geospasial
		2. Mengoptimalkan Satu Data Satu Peta (One data one map) melalui pemutakhiran data/informasi	Meningkatkan pengembangan data dan analisis pembangunan (data sektoral dan spasial)



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pembangunan daerah secara umum merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2019-2023) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Rencana strategis beserta turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis BAPPEDA Prov. Kaltim dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023.

6.1. Rencana Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” yang sama yakni pembentukan BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai lembaga perencana pembangunan daerah berkualitas. Berikut program-program BAPPEDA Prov. Kaltim yang disusun untuk mencapai visi dan misinya:



Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Strategi

Sasaran		Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	
No.	Strategi/Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
S1 : Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota			
1.	Mengintensifkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran
2	Meningkatkan kualitas SDM Perencana	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi perencana
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian
		Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
		Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah
		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD
S2 : Terkendalinya Capaian Sasaran Pembangunan Daerah			
1.	Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan



Sasaran		Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	
No.	Strategi/Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
		Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota
S3: Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah			
1.	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang terintegrasi	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan
2.	Menyediaan dan pemutakhiran data/informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan		

Penyusunan Program yang akan diselenggarakan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim selama lima tahun terbagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu:

A. Program yang terkait Perencanaan Pembangunan, yaitu:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan

Perencanaan pembangunan Kalimantan Timur difokuskan pada pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023. Program ini ditujukan untuk menjabarkan program jangka menengah sebagai implementasi RPJMD Prov. Kaltim menjadi program tahunan melalui RKPD Prov. Kaltim. Dalam pelaksanaan program ini harus dukungan oleh seluruh komponen masyarakat, aparatur pemerintah, hingga pihak swasta.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Dalam bidang perencanaan pembangunan daerah salah satu bagian adalah perencanaan pembangunan Daerah Jangka Menengah, yang kemudian akan menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra, dan Renja. Sehingga dengan Program perencanaan pembangunan daerah jangka menengah ini diharapkan dalam penyusunan

dokumen RPJMD, akan dihasilkan dokumen yang mampu menjadi pedoman yang dapat merangkul segala aspek dalam pembangunan Kalimantan Timur.

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang

Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang merupakan perencanaan yang memiliki pandangan jauh kedepan dalam bagian tata pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam program ini akan dihasilkan suatu Dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RPJPD), yang memedomani RPJPN. Sehingga dokumen RPJPD ini merupakan langkah besar dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui program ini diharapkan dapat menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dan kemudian akan mampu menarik dokumen perencanaan lainnya, yang akan berimbas pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Perencanaan pembangunan di bidang ekonomi merupakan bagian dari program perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pada pengembangan ruang gerak roda perekonomian Kalimantan Timur. Kinerja bidang ekonomi terkait pada perencanaan operasional kegiatan serta mengkoordinasikan penyusunan program perekonomian tahunan. Perlu perhatian khusus pada permasalahan perekonomian Kalimantan Timur saat ini, terutama pada sektor migas dan batubara yang kian hari kian menipis produktivitasnya padahal sektor ini merupakan kontributor utama dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur.

5. Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah

Perencanaan prasarana wilayah merupakan program perencanaan pembangunan daerah yang difokuskan pada peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pembangunan berbasis kewilayahan. Bidang ini merencanakan operasional kegiatan serta mengkoordinasikan penyusunan program tahunan terkait peningkatan prasarana wilayah. Sisi positif dalam program ini sekaligus pendukung utama dalam pelaksanaan prasarana wilayah adalah sarana maupun infrastruktur perhubungan, prasarana

sumber daya air dan tata ruang, serta cipta karya perumahan dan pemukiman yang harus diperhatikan agar terjadi peningkatan aksesibilitas terutama di wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, bidang prasarana wilayah akan melaksanakan perencanaan pembangunan dengan mengkoordinir tugas-tugas sub-sub bidang yang berada di bawahnya melalui program ini.

6. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya merupakan salah satu program dasar pembangunan daerah karena menyangkut tentang kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya, peningkatan kinerja aparatur pemerintahan dan sebagainya. Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya memiliki banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya fasilitas di wilayah terpencil, sehingga akses pendidikan maupun kesehatan masih belum sesuai harapan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi program antara Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan bidang teknis lainnya agar terjadi keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas Pemerintahan dan Sosial Budaya

7. Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu program utama dalam peningkatan mutu dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Program ini disusun untuk mendukung perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah selama lima tahun ke depan sehingga setiap tahapannya memerlukan pengendalian dan evaluasi baik di bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan aparatur, serta pengembangan sumber daya manusia.



8. Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah

Program ini disusun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim dimana pengendalian rencana pembangunan daerah merupakan tolak ukur untuk pencapaian target pembangunan sesuai rencana pembangunan daerah.

9. Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah

Program ini disusun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim dimana data dan analisis pembangunan daerah merupakan faktor penentu keberhasilan dari perencanaan pembangunan. Semakin akurat data dan analisis pembangunan daerah, semakin baik pula kualitas perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, program pengembangan data dan analisis pembangunan daerah disusun sebagai upaya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

10. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Program ini ditujukan untuk menjabarkan program jangka menengah sebagai implementasi RPJMD Prov. Kaltim menjadi program tahunan melalui RKPD Prov. Kaltim dan pengendalian serta evaluasi rencana pembangunan daerah merupakan tolak ukur untuk pencapaian target pembangunan sesuai rencana pembangunan daerah.

B. Program yang terkait operasional dan manajerial bersama, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

6.2. Rencana Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja BAPPEDA Prov. Kaltim, kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:



A. Program dan Kegiatan yang terkait Perencanaan Pembangunan

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas utama BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai koordinator pembangunan daerah serta Perencanaan Pembangunan Sektoral mencakup kordinasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi serta kompilasi data dan analisis pembangunan daerah, yaitu:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan
 - Penyusunan rancangan RKPD;
 - Penyusunan RPJMD;
 - Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
 - Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi
 - Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksnaan Sistem informasi Perencanaan
 - Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD
 - Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan
 - Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah
2. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata.
3. Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
4. Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah



- Koordinasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan;
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman
5. Program Pengendalian dan Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan Daerah
- Monitoring dan Pelaporan hasil pelaksanaan Pembangunan
 - Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD, RPJMN dan RKPD
6. Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah
- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Provinsi
 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
7. Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah
- Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah
 - Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah
8. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
 - Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
 - Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah

B. Program dan Kegiatan Operasional dan Manajerial Bersama

Program ini merupakan program yang juga digunakan oleh perangkat daerah lainnya yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Pelaksanaan Administrasi Pelaporan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
 - Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
 - Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana



3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kapasitas Pemerintah Daerah

- Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah;
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

6.3. Indikator Pencapaian Tujuan

Masukan (*Input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan keluaran (*output*). *Input* kegiatan meliputi sumber daya manusia, dana, dan fasilitas.

Keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang diharapkan akan tercapai dari suatu kegiatan baik berupa produk jasa fisik maupun non fisik seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Hasil (*Outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh *stakeholders* dan masyarakat.

Dampak (*Impact*) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (persen/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (persen), dan sebagainya.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan serta kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif.

6.4. Pendanaan Indikatif

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, strategi pembiayaan dalam perencanaan strategis pembangunan BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan BAPPEDA Prov.

Kaltim. Dalam pelaksanaan perencanaan, sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat.

Pembiayaan indikatif Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Pendanaan indikatif tersebut tersaji pada lampiran tabel 6.2



Tabel 6.2
Program, Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Indikatif (dalam Juta)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82,34%	85%	8,450,000,000.00	86%	8,450,000,000.00	87%	8,450,000,000.00	88%	8,450,000,000.00	90%	8,450,000,000.00		48,050,000,000.00
			69 Instansi/Lembaga	8,450,375,000.00	70 Instansi/Lembaga	8,450,375,000.00	71 Instansi/Lembaga	8,450,375,000.00	73 Instansi/Lembaga	8,450,375,000.00	75 Instansi/Lembaga	8,450,375,000.00		8,450,375,000.00
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Vertikal yang Dilayani	67 Instansi/Lembaga	69 Instansi/Lembaga	8,450,375,000.00	70 Instansi/Lembaga	8,450,375,000.00	71 Instansi/Lembaga	8,450,375,000.00	73 Instansi/Lembaga	8,450,375,000.00	75 Instansi/Lembaga	8,450,375,000.00		8,450,375,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1	2	8,061,650,000.00	3	6,561,650,000.00	4	6,561,650,000.00	5	6,561,650,000.00	5	6,561,650,000.00		6,561,650,000.00
Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur	60 Unit	147 Unit	3,950,991,000.00	172 Unit	2,450,991,000.00	192 Unit	2,450,991,000.00	207 Unit	2,450,991,000.00	217 Unit	2,450,991,000.00		2,450,991,000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik	110 Unit	120 Unit	4,110,659,000.00	126 Unit	4,110,659,000.00	130 Unit	4,110,659,000.00	140 Unit	4,110,659,000.00	150 Unit	4,110,659,000.00		4,110,659,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	13,80%	15%	3,407,400,000.00	17%	3,407,400,000.00	20%	3,407,400,000.00	23%	3,407,400,000.00	25%	3,407,400,000.00		3,407,400,000.00
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	36 Rapat	38 Rapat	2,077,400,000.00	40 Rapat	2,077,400,000.00	40 Rapat	2,077,400,000.00	42 Rapat	2,077,400,000.00	45 Rapat	2,077,400,000.00		2,077,400,000.00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15 orang	30 orang	1,330,000,000.00	40 Orang	1,330,000,000.00	50 Orang	1,330,000,000.00	60 Orang	1,330,000,000.00	70 Orang	1,330,000,000.00		1,330,000,000.00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	77,69 (BB)	78 (BB)	3,621,425,000.00	78,5 (BB)	3,621,425,000.00	79 (A)	3,621,425,000.00	80 (A)	3,621,425,000.00	81 (A)	3,621,425,000.00		3,621,425,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	431,425,000.00	4 Dokumen	431,425,000.00	4 Dokumen	431,425,000.00	4 Dokumen	431,425,000.00	4 Dokumen	431,425,000.00		431,425,000.00



Lanjutan Tabel 6.2

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2019			2020			2021			2022		
			Target	RP	Target	Target	RP	Target	Target	RP	Target	Target	RP	Target
Pembangunan	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	4 Dokumen	190.000.000,00	4 Dokumen	4 Dokumen	190.000.000,00	4 Dokumen	4 Dokumen	190.000.000,00	4 Dokumen	4 Dokumen	190.000.000,00	4 Dokumen
	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan	0 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen
	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan	0 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen
	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan	0 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen
Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase pencapaian sasaran yang menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	53,23%	60%	4.824.900.000,00	65%	5.324.900.000,00	75%	5.324.900.000,00	80%	5.324.900.000,00	90%	5.324.900.000,00	5.324.900.000,00	90%
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	0 Laporan	1 Laporan	1.257.600.000,00	4 Laporan	4 Laporan	1.507.600.000,00	4 Laporan	4 Laporan	1.507.600.000,00	4 Laporan	4 Laporan	1.507.600.000,00	4 Laporan
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	0 Laporan	1 Laporan	897.000.000,00	4 Laporan	4 Laporan	1.147.000.000,00	4 Laporan	4 Laporan	1.147.000.000,00	4 Laporan	4 Laporan	1.147.000.000,00	4 Laporan
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	0 Laporan	1 Laporan	2.670.300.000,00	4 Laporan	4 Laporan	2.670.300.000,00	4 Laporan	4 Laporan	2.670.300.000,00	4 Laporan	4 Laporan	2.670.300.000,00	4 Laporan
Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	45,68%	50%	3.772.160.000,00	60%	3.772.160.000,00	70%	3.772.160.000,00	80%	3.772.160.000,00	90%	3.772.160.000,00	3.772.160.000,00	90%
	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	0 Dokumen	3 Dokumen	1.838.160.000,00	3 Dokumen	3 Dokumen	1.838.160.000,00	3 Dokumen	3 Dokumen	1.838.160.000,00	3 Dokumen	3 Dokumen	1.838.160.000,00	3 Dokumen
	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	0 Dokumen	3 Dokumen	1.838.160.000,00	3 Dokumen	3 Dokumen	1.838.160.000,00	3 Dokumen	3 Dokumen	1.838.160.000,00	3 Dokumen	3 Dokumen	1.838.160.000,00	3 Dokumen
	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	0 Dokumen	3 Dokumen	1.838.160.000,00	3 Dokumen	3 Dokumen	1.838.160.000,00	3 Dokumen	3 Dokumen	1.838.160.000,00	3 Dokumen	3 Dokumen	1.838.160.000,00	3 Dokumen



Lanjutan Tabel 6.2

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP
Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPIPD, RPIPD dan RPKD	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RPKD Kab/Kota	0 laporan	6 laporan	1.934.000.000,00	6 laporan	1.934.000.000,00	6 laporan	1.934.000.000,00	6 laporan	1.934.000.000,00	6 laporan	1.934.000.000,00	6 laporan	1.934.000.000,00
	Dokumen Evaluasi RPKD	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	
Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	38,6%	50%	2.564.300.000,00	60%	3.064.300.000,00	70%	3.064.300.000,00	80%	3.064.300.000,00	90%	3.064.300.000,00	90%	3.064.300.000,00
	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	0 laporan	1 laporan	705.000.000,00	1 laporan	905.000.000,00	1 laporan	905.000.000,00	1 laporan	905.000.000,00	1 laporan	905.000.000,00	1 laporan	905.000.000,00
	Laporan koordinasi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	0 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan	
	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	0 laporan	1 laporan	710.000.000,00	1 laporan	910.000.000,00	1 laporan	910.000.000,00	1 laporan	910.000.000,00	1 laporan	910.000.000,00	1 laporan	910.000.000,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan (SPKD)	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1 laporan	0 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan	
	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	0 laporan	1 laporan	1.149.300.000,00	1 laporan	1.249.300.000,00	1 laporan	1.249.300.000,00	1 laporan	1.249.300.000,00	1 laporan	1.249.300.000,00	1 laporan	1.249.300.000,00
	Jumlah laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan	
Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	45,2%	55%	2.850.000.000,00	65%	3.350.000.000,00	75%	3.350.000.000,00	85%	3.350.000.000,00	90%	3.350.000.000,00	90%	3.350.000.000,00
	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	0 laporan	2 laporan	1.225.900.000,00	2 laporan	1.425.900.000,00	2 laporan	1.425.900.000,00	2 laporan	1.425.900.000,00	2 laporan	1.425.900.000,00	2 laporan	1.425.900.000,00



Lanjutan Tabel 6.2

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2019			2020			2021			2022		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP
Pembangunan Kordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	0 Laporan	1 Laporan	1.012.700.000,00	1 Laporan	1.012.700.000,00	1 Laporan	1.012.700.000,00	1 Laporan	1.012.700.000,00	1 Laporan	1.012.700.000,00	1 Laporan	1.012.700.000,00
	Laporan identifikasi kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Pusat-Pusat Pertumbuhan	0 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	
	Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	4 Laporan	1 Laporan	611.400.000,00	1 Laporan	911.400.000,00	1 Laporan	911.400.000,00	1 Laporan	911.400.000,00	1 Laporan	911.400.000,00	1 Laporan	911.400.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	78,53%	80%	7.085.850.000,00	85%	7.085.850.000,00	90%	7.385.850.000,00	95%	8.585.850.000,00	100 %	8.585.850.000,00	100 %	8.585.850.000,00
Penyusunan RKPD	Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020 dan perubahan RKPD Tahun 2019	0 dokumen	2 dokumen	1.120.000.000,00	2 dokumen			0,00	2 dokumen			0,00	2 dokumen	
Penyusunan RPJMD	Dokumen RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2018-2023	0 dokumen	1 dokumen	1.200.000.000,00	0 dokumen			0,00	0 dokumen			0,00	1 dokumen	
Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah pelaksanaan Forum pembahasan RKPD yang dilakukan	0 forum	3 forum	1.500.000.000,00	3 forum			0,00	3 forum			0,00	3 forum	
	Jumlah pelaksanaan Forum pembahasan RPJMD yang dilakukan	0 forum	3 forum		3 forum				3 forum				3 forum	
Kordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Forum Pembahasan Rencana Pembangunan	0 dokumen	1 dokumen	960.000.000,00	3 Dokumen			2.550.000.000,00	2 dokumen			2.540.000.000,00	2 dokumen	
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	0 tahap	6 Tahap	919.100.000,00	6 Tahap			0,00	6 Tahap			0,00	6 Tahap	
Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA- PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	0 Dokumen	8 Dokumen	1.386.750.000,00	8 Dokumen			0,00	8 Dokumen			0,00	8 Dokumen	
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, P-RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen		0,00	3 Dokumen		2.230.000.000,00	2 Dokumen			2.240.000.000,00	5 Dokumen	
Penyusunan Dokumen Rancangan Pendanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pendanaan Rancangan Daerah (KUA- PPAS, KUPA-PPAS, Aplikasi SIPPD)	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen			2.305.850.000,00	2 Dokumen			2.305.850.000,00	2 Dokumen	
														2.305.850.000,00



Lanjutan Tabel 6.2

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP
Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang Diverifikasi/Evaluasi	0 Dokumen	0 112 Dokumen				66 Dokumen	1.500.000.000	66 Dokumen	1.500.000.000	66 Dokumen	1.500.000.000		1.500.000.000
Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	82,30%	85%	1.500.000.000,00	87%		91%	0,00	94%	0,00	96%	0,00		0,00
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Provinsi	Dokumen Pengendalian Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	0 Dokumen	2 Dokumen	750.000.000,00	2 Dokumen		2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0,00		0,00
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Dokumen Pengendalian Rencana Pembangunan Provinsi Dengan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	2 Dokumen	750.000.000,00	2 Dokumen		2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0,00		0,00
Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan	74%	76%	1.911.940.000,00	78%		81%	1.911.940.000,00	85%	1.911.940.000,00	87%	1.911.940.000,00		1.911.940.000,00
Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektor	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	14 dokumen	14 dokumen	1.206.540.000,00	14 dokumen		14 dokumen	1.206.540.000,00	14 dokumen	1.206.540.000,00	14 dokumen	1.206.540.000,00		1.206.540.000,00
Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Geospasial Tematik	0 IGT	200 IGT	705.400.000,00	200 IGT		200 IGT	1.705.400.000,00	200 IGT	705.400.000,00	200 IGT	705.400.000,00		705.400.000,00



BAB VII

KINERJA PENYELEGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen perubahan RPJMD diuraikan dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	TARGET					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Emisi GRK	ton Co2e	1.515	1.464	1.328	1.280	1.190	1.065	1.065
2	Nilai Sakip		77,49	78,52	80,30	81,63	83,50	85,00	85,00



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mencapai target-target sasaran yang telah disepakati bersama. Sasaran utama dari Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator pembangunan daerah adalah bagaimana Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dijabarkan dalam sasaran RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 dapat tercapai.

Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA Prov. Kaltim dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 bersifat dinamis untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi, dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu komitmen dari setiap unit kerja BAPPEDA Prov. Kaltim sangat diharapkan, dengan demikian BAPPEDA Prov. Kaltim sesuai tugas dan fungsinya untuk dapat mengedepankan aspek perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Disamping itu perlu ditingkatkan koordinasi antara BAPPEDA Prov. Kaltim dengan Perangkat Daerah dan kabupaten/kota dengan tujuan untuk mencapai sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023 yang disusun melalui tahapan sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan



fungsi BAPPEDA Prov. Kaltim dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program tahun 2019-2023 dituangkan kedalam kebijakan, strategi dan program perencanaan pembangunan yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran tahunan BAPPEDA Prov. Kaltim.